

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 29/DSN-
MUI/VI/2002 TERHADAP SISTEM PROSENTASE
UJRĀH/FEE DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN
HAJI DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRIAN**

SKRIPSI

OLEH :

REZA RIZKI AGUSTIN

NIM.C92216198



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Rizki Agustin

NIM : C92216198

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perdata Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.
29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Sistem Prosentase
Ujrāh/Fee dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji
di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Reza Rizki Agustin

NIM.C92216198

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Reza Rizki Agustin (NIM.C92216198) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, followed by a small checkmark-like mark.

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Reza Rizki Agustin NIM. C92216198 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 16 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reza Rizki Agustin
NIM : C92216198
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rezarizkiagustin1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 29/DSN-MUI/VI/2002
TERHADAP SISTEM PROSENTASE *UJRĀH/FEE* DALAM PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN HAJI DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRIAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2020
Penulis

Reza Rizki Agustin

ABSTRAK

Penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Sistem Prosentase *ujrah/Fee* Dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian” untuk menjawab permasalahan yakni yang *pertama*, bagaimana sistem prosentase *ujrah /fee* dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian ?. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap sistem prosentase *ujrah/fee* dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian ?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan datanya diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumenter. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan kesimpulannya diperoleh melalui logika, deduktif, dan komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan, Sistem prosentase *ujrah* terhadap pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian merupakan dasar pembebanan kewajiban *ujrah* yang berasal dari akad *Kafālah bil ujrah* dan *wakālah bil ujrah* yang ditentukan dalam bentuk prosentase tertentu yakni 1,5% perbulan dari jumlah talangan yang diajukan nasabah. Menurut analisis hukum Islam sistem prosentase *ujrah* terhadap pembiayaan dana talangan haji, dilihat dari unsur penggunaan akad *Kafālah bil ujrah* tidak sah, karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi, sebab tidak ada ikatan utang piutang sebelumnya antara *Makfūl 'anhu* (nasabah) dan *Makfūl lahu* (Kemenag). Jika dilihat dari unsur penetapan sistem prosentase *ujrah*nya masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam, karena akad *Kafālah* yang disertai dengan *ujrah*/imbalan tidak boleh dijadikan lahan untuk memupuk keuntungan, tidak boleh dipersyaratkan dan tidak boleh memberatkan. Dan penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase dari talangan pokok merupakan imbalan jasa yang hukumnya haram, hal ini didukung dengan adanya pendapat para ulama kontemporer yang menyatakan bahwa sistem imbal jasa dalam bentuk prosentase dari talangan pokok yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan belum sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, penetapan sistem prosentase *ujrah* belum sesuai dengan fatwa tersebut. Karena sistem prosentase secara otomatis akan membuat besar *ujrah* ditetapkan berdasarkan besar kecilnya jumlah talangan yang diberikan dan membuat nominal *ujrah* tidak tetap.

Dari hasil kesimpulan tersebut, penulis menyarankan dari sisi normatif agar Fatwa DSN MUI membuat Fatwa tentang *Kafālah bil ujrāh* dan *wakālah bil ujrāh* secara terperinci lagi terutama dalam hal penetapan *ujrāh*. Kemudian dari sisi praktis, agar KSPS BMT UGT Sidogiri mempertimbangkan pengambilan *ujrāh* dalam bentuk sistem prosentase agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji agar keberangkatan haji tidak mengarah dan tidak terjebak dengan praktik riba. Serta agar Pemerintah untuk lebih menertibkan praktik pembiayaan dana talangan haji yang ada di seluruh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II <i>Kafālah, Wakālah</i> , FATWA DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002	23
A. <i>Kafālah</i>	23
1. Pengertian <i>Kafālah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Kafālah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Kafālah</i>	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pembiayaan <i>Kafālah</i> Haji Musiman.....	59
Tabel 3.2	Pembiayaan <i>Kafālah</i> Haji Bulanan.....	59
Tabel 3.3	Pembiayaan <i>Kafālah</i> Haji Nasabah Ibu Iva.....	62
Tabel 3.4	Pembiayaan <i>Kafālah</i> Haji Nasabah Ibu Alimah.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema praktik akad <i>kafālah</i>	31
Gambar 2.2	Skema praktik akad <i>wakālah</i>	39
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kepegawaian di KSPS BMT UGTSidogiri Capem Krian.....	46
Gambar 3.2	Tata cara pendaftaran Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekah atau Makkah, atau Bakkah merupakan kota suci utama bagi umat Islam. Di kota yang terletak di tengah-tengah gurun yang tandus di negara Arab Saudi inilah terdapat Ka'bah, kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Di kota tersebut banyak umat Islam diseluruh penjuru dunia melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu haji. Haji adalah rukun Islam kelima dan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Ibadah yang dilakukan dengan mendatangi Mekah guna menjalankan ibadah tawaf, sai, wuquf serta berbagai ibadah lain untuk menjalankan perintah Allah SWT.¹ Dalam melaksanakan ibadah ini kita dituntut untuk ikhlas, sabar, bertoleransi, serta menghargai hak-hak orang lain. Sehingga berhaji bisa menjadi bentuk pelatihan pengendalian diri dan pengekangan ego.²

Rasulullah saw melaksanakan ibadah haji hanya sekali dalam hidupnya, sedangkan umrah 4 kali.³ Pada waktu menjalankan ibadah haji, Rasulullah menyampaikan khotbah untuk para jemaah haji yang dikenal dengan khotbah *wada'*. Dalam khotbah *wada'*, pesan Rasulullah setidaknya menyentuh enam isu penting, yakni : (1) Tinggalkan ajaran jahiliyah, (2) Berpegang teguh pada

¹ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987), 31.

² Guntoro Supriyo, *Spriti Haji Inspirasi Menjawab Fenomena Global* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo), 3.

³ Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Manasik* (Malang : UIN Maliki Press, 2015), 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مَّذْخَرَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁵

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya riba adalah sesuatu yang diharamkan. Islam telah melarang praktik riba (*usury*/bunga),oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran serta As-Sunnah tidak diizinkan untuk mencari harta kekayaan dan nafkah melalui bunga.⁶ Apalagi berangkat haji dengan uang yang mengandung riba adalah sangat diharamkan.

Menjalankan ibadah haji adalah perintah bagi seluruh umat muslim yang mampu menjalankannya. Setelah dirasa mampu dan telah mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji, bersegeralah, tinggalkan urusan dunia untuk sementara.⁷ Namun, karena banyaknya kebutuhan untuk menunaikan ibadah haji dengan keadaan tidak memiliki dana yang cukup dan tidak terpikir adanya alternatif yang dianggap lazim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pemerintah berusaha memecahkan permasalahan dengan memberlakukan pembiayaan ibadah haji melalui dana talangan haji di berbagai

⁴ Ibid., 5.

⁵ Ustaz Teteng Sopian, *Al-Qur'anul Karim; Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional, 2018), 66.

6 M. Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 51.

⁷ Ja'far Sodik Achmad, *Tuntunan Haji & Umrah* (Yogyakarta : Buku Pintar, 2013), 27.

Pelaksanaan pembiayaan Dana Talangan Haji yang masih dijalankan di beberapa lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari riba. Prinsip syariah diartikan sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Hadis, pendapat para ulama, dan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Oleh karena itu, seluruh

[illegible]

Lembaga Keuangan Pembiayaan syariah harus memenuhi serta mematuhi prinsip syariah Islam.

Lembaga Keuangan Syariah, yakni KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian menawarkan banyak produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaannya yaitu pembiayaan dana talangan haji yang dinamakan pembiayaan *Kafālah* Haji. Pembiayaan *Kafālah* Haji adalah pembiayaan untuk nasabah agar memperoleh kebutuhan anggaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kemenag, guna memperoleh nomor kursi porsi haji. Dalam Program ini pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian menggunakan akad *Kafālah bil Ujrāh* dan *wakālah bil Ujrāh*.

Akad *Kafālah* adalah jaminan/tanggungan yang diberikan penanggung (*Kāfil*) kepada pihak ketiga (*Makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*Makfūl ‘anhu*) yang ditanggung. Atas jasa penjaminan tersebut, penjamin dapat meminta imbalan tertentu. Peristiwa inilah yang disebut sebagai *Kafālah bil ujrāh*.⁹ Akad *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan atau pemberian mandat kepada seseorang yang dapat dipercaya, untuk melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan kesepakatan yang berprinsip syariah. Akad *wakālah* boleh disertai dengan upah, karena hal tersebut sebagai timbal balik atas pekerjaannya. Pengikut dari mazhab Hambali yang didukung Ishaq berkata : “Jual lah ini dengan harga seratus dan selebihnya untukmu”.

⁹ M. Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), cet. 1, 116-117.

Akad *Kafālah* dan *wakālah* sejatinya adalah akad tabarru' bukan akad komersiil. Pengambilan *ujrah* dalam akad *Kafālah* diperbolehkan menurut Fatwa DSN No. 57 Tahun 2007 : “*Fee* atas transaksi akad *Kafālah* harus disepakati dan dituangkan dalam akad”, dan Fatwa DSN No. 11 Tahun 2000 : “Dalam akad *Kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan”.

Sedangkan pengambilan *ujrāh* dalam akad *wakālah* juga diperbolehkan menurut pendapat ulama yakni ibn Qudamah, yang menyatakan : “*Akad taukil (wakālah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.*” Dan pendapat penulis *Takmilah Fath al-Qadir* dan Wahbah Zuhaili, menyatakan : “*Wakālah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan*”.¹¹ Dan akad *wakālah* yang disertai *ujrāh* juga diperbolehkan dalam Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000. Namun ketentuan *wakālah bil ujrāh* ada dalam Fatwa DSN No.34/DSN-MUI/IX/2002 :“*Besar ujrāh harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase*”.

bu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2017), Cet. 1, 156-157.

Shahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Widia Utama, 2010), 259.

¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 259.

Adapun sebelum pencairan dana talangan diberikan, nasabah diwajibkan mengucapkan nazar yang menyatakan bahwa nasabah wajib membayar talangan pokok beserta *ujrāh* nya dengan waktu yang telah disepakati, dan apabila terlambat melakukan pembayaran agsuran/pelunasan atas pembiayaan yang telah nasabah terima maka diwajibkan memberikan dana senilai 0,17% perhari dari nilai tunggakan pokok pembiayaan, terhitung sejak 7 hari dari jadwal angsuran atau pelunasan pembiayaan.

Melihat pelaksanaan penetapan *ujrāh* di KJKS UGT BMT Sidogiri Krian dikhawatirkan *ujrāh*-nya merupakan bunga dan mengarah kepada riba. Dikarenakan penetapan *ujrāh* pihak BMT ditetapkan berdasarkan sistem

[illegible]

“setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba”¹³

¹³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta : KENCANA, 2017), cet. 7, 138.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah bertujuan untuk membantu menemukan masalah yang layak untuk ditulis guna mengurai berbagai pertanyaan tentang tema tertentu agar seseorang dapat mendapatkan gambaran secara lengkap dan penuh mengenai suatu permasalahan. Dengan adanya identifikasi masalah penulis akan memperoleh jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang dipertanyakan, sehingga bisa membuka wawasan terhadap permasalahan yang menjadi perhatian penulis.¹⁵ Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya yakni sebagai berikut :

- ¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan...*, 219-220.

[illegible]

- ### C. Rumusan Masalah

- #### D. Kajian Pustaka

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), ed.1, cet.2, 26.

- ¹⁷ Aldy Aprilleo, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan Ijārah Pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syirkah Mu’awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur”, (Skripsi --- UIN SA Surabaya, 2019).

3. Ari Vironika (skripsi 2017) dengan judul “Studi Komparasi Terhadap Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT. Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo”. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan analisis akad *Kafālah bil ujrah*. perbedaannya yaitu Dalam skripsi ini lebih mengarah kepada perbandingan akad, dan penerapan akad antara PT. Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya yang menerapkan akad *qārd wal ijārah* serta BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo yang menerapkan akad *Kafālah bil ujrah*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semua prosedur dari keduanya sama, namun perbedaannya dari segi dana talangan maksimal yang diberikan dan dari segi akad yang dipakai di dua tempat tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.¹⁹

¹⁹ Ari Vironika, “Studi Komparasi Terhadap Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT. Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo”, (Skripsi --- UIN SA Surabaya, 2017).

Tujuan Penelitian ialah penelitian yang berkenaan dengan maksud peneliti terkait dengan perumusan masalah dan judul, yang bertujuan untuk menemukan masalah-masalah dan mencari cara untuk menyelesaikannya.²⁰ Dalam hal ini tujuan penelitian ini yakni :

- [illegible]

Dokumenter adalah dengan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh yang bersangkutan. Dengan adanya dokumenter peneliti akan mendapatkan gambaran terhadap suatu media dalam bentuk tertulis serta dokumen lain yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan.³¹

Oleh karena itu penulis menggunakan metode dokumenter untuk menelusuri data berupa fakta melalui media tertulis berupa dokumen resmi mengenai pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian sebagai bahan untuk menelaah suatu kebijakan atau kepemimpinan lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitif. Metode deskriptif analitif yaitu metode dimana tata cara penyelesaian masalah penelitian dengan menyelidiki serta melihat fakta berupa data-data di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian.

Pola pikir yang digunakan yaitu deduktif dan komparatif. Adapun Pola pikir deduktif yaitu pola berpikir dari pernyataan yang bersifat umum yang disimpulkan menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini fakta-fakta berupa data-data pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), cet. 3, 143.

Pertama bab Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Ketiga, membahas mengenai bab produk dana talangan haji yakni Produk Pembiayaan *Kafālah* haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian yaitu tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi kepegawaian, produk-produk yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian, dan pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian.

[illegible]

BAB II

***Kafālah, Wakālah*, FATWA DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002**

A. *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*

Menurut bahasa arab arti *kafālah* berasal dari kata *kafala* (كَفَلَ) yang artinya menanggung, *yakfulu* (يَكْفُلُ) *kuflan* (كُفْلًا) menjamin, *takāful* (تَكْفُلُ) saling menanggung, *yatakāfulu* (يَتَكَفَّلُونَ) *takāfulan* (تَكْفُلًا) penanggung, penjamin.

Sedangkan secara terminologi arti *kafālah* banyak memunculkan berbagai makna di kalangan para ulama fiqih, yaitu Ulama Madhab Hanāfī menerangkan dalam definisi *damān* atau *kafālah* memiliki pengertian yaitu :¹

- Kafālah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang, atau benda.
- Kafālah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.

Sedangkan menurut ulama Mālikiyah , Syafi'iyah dan Hanābilah, Al-*Kafālah* adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang dijamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua. Adapun menurut Sayyiq Sābiq yang dimaksud dengan *Kafālah* adalah proses benda (materi) yang *jama'*, baik hutang, barang maupun

¹ M. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam)* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 44.

Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa akad *Kafālah* merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kāfil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*Makfūl ‘anh*)².

1) Al-Quran

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

b) Surat Yūsuf ayat 66

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya : “Ya’qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya’qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”.⁴

⁴ Ibid., 243.

c) Surat al-Naḥl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵

d) Surat Ali Imrān ayat 37

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّىٰ لَكَ
هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya : ‘‘Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab’’.⁶

2) Al-Hadith

الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن ماجة)

Artinya : “Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar”. (HR. Ibnu Mājah).⁷

حَمَلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمِ حَتَّى يَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ
يَاقُبَيْشَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٌ تَحَمَّلَ فَنَامَرُكَ بِهَا قَالَ :
حَمَالَةً فَحَمَلْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُسَيِّبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ (رواه مسلم)

⁵ Ibid., 277.

⁶ Ibid., 54.

⁷ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum...*, 47-48.

Ijma' ulama memperbolehkan akad *Kafālah* untuk keperluan yang dibutuhkan manusia sebagai usaha untuk mencegah suatu kerugian dari orang yang berhutang. Banyak manusia di zaman Nabi yang sudah mempraktikkannya, terbukti sampai saat ini tidak terjadi komplain atau pengingkaran dari umat Islam.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹

Dalam menetapkan rukun *Kafālah* ada perbedaan pendapat ulama fiqh, yakni Imam Abū Hanifah serta Muhammad bin Hasan asy-Syaybani, yaitu :

- Ijāb* (pernyataan penerimaan tanggung jawab dari *kāfil* (penjamin))
- Qābul* (persetujuan Kreditor).

Akan tetapi secara umum menyatakan bahwa rukun *kafālah* adalah :¹⁰

1. *Kāfil* (Pihak penjamin /yang bertanggung jawab atas kewajiban orang lain)

¹⁰ M. Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 113.

b. *Kafālah* atas suatu barang maupun penyerahannya (*al-kafālah bi ‘ain aw bi at-taslim*)

c. *Kafālah bi al-dark*

¹⁵ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum...*, 52.

Menurut Mustafā Abdullāh al-Hamsyari, mengutip pendapat Imām Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadakan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap uang sogok (*risywāh*), tetapi dianggap sebagai upah (*ju'allah*), dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atas biaya perjalanannya. Ulama Kontemporer lain, Abdul Sa'i al-Mirri, mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin.¹⁸ Sedangkan menurut al-Mawardi, apabila ada seseorang yang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, maka akad tersebut tidak diperbolehkan dan imbalannya tidak sah. Dan akad *Kafālah* yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah.

Dalam SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, disebutkan bahwa kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar akad *Kafālah* berlaku persyaratan salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan/*fee* yang disepakati diawal dan

[illegible]

dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.¹⁹ Imbalan/*fee* tersebut diperoleh atas jasa pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga (*Makfūl lah*).

Adapun Fatwa yang membolehkan akad *Kafālah* yang disertai dengan *ujrah/fee* adalah :

1. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah* :
 - 1) Dalam akad *Kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
 - 2) *Kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak
2. Fatwa DSN No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter Of Credit* (L/C) dengan akad *Kafālah bil Ujrāh* : “*Fee* atas transaksi akad *Kafālah* harus disepakati dan dituangkan dalam akad”.²⁰

B. Wakālah

1. Pengertian *Wakālah*

Kata *wakālah* berasal dari bahasa arab, yakni dari kata *wakālah-yakilu-waklan* yang bermakna menyerahkan/mewakilkkan suatu urusan sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan wakil. Kemudian menurut istilah, *wakālah* merupakan akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk

¹⁹ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 166-167.

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan...*, 256.

melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.²¹ Adapun konsep *wakālah* menurut sejumlah ulama adalah sebagai berikut :²²

- a. Hanafiyah : *Wakālah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (bertindak hukum).
- b. Malikiyah : “*Wakālah* adalah menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”.
- c. Syafi’iyah : “*Wakālah* adalah suatu *ibrah* seorang yang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan di masa hidupnya”.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain kepada sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang bisa diwakilkan.

2. Dasar Hukum *Wakālah*

1) Al-Quran

- a. Surat Yusuf ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya : Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".²³

- b. Surat al-Baqarah ayat 283

١٠ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ اٰمَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ،

Artinya : “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,”²⁴

²¹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum..., 32.*

²² Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA GROUP, 2019). 147.

²³ Ustaz Teteng Sopian, *Al-Qur'anul Karim; Tafsir Bil Hadis...*, 242.

²⁴ Ibid., 49.

Rukun *Wakālah* yaitu sesuatu yang wajib ada dan harus dipenuhi..

a. *Muwakkil* (seseorang yang mewakili)

b. *Wākil* (seseorang yang mewakili)

c. *Muwākkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

d. *Shighat* (Ijāb dan qābul)

Sedangkan syarat dari *Wakālah* adalah sebagai berikut :

a. *Muwakkil*

Syarat bagi seseorang yang mewakilkan yaitu pemilik barang dapat bertindak hukum pada harta yang dimilikinya atau berada dibawah kekuasaannya, jika tidak maka akad *wakālah* tersebut batal.

b. *Wākil*

Syarat bagi yang newakili adalah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal (tidak idiot dan tidak gila serta sudah dewasa). Menurut Hanafiyah seorang anak kecil yang telah bisa membedakan suatu hal yang baik dan hal yang buru,k hukumnya sah menjadi seorang wakil, karena

[illegible]

Syarat *Muwākkal fih* yaitu : Sesuatu hal tersebut bisa diwakilkan, contohnya yaitu pengalihan hutang, jual beli, pemberian kuasa, serikat dagang, talak nikah, dan lain-lain. Sesuatu hal yang bersifat badaniyah tidak diperbolehkan. Sesuatu hal tersebut diketahui oleh *Muwakkil*, maksudnya bahwa persoalan itu tidak boleh samar harus jelas.

Shighat diucapkan sebagai wujud keridhaannya untuk mewakili, serta wakil menerimanya. Pernyataan Ijāb serta qābul wajib dinyatakan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melaksanakan suatu akad.

Ada beberapa macam *Wakālah*, antara lain :

- 1) *Wakālah al-muṭlaqah*, yaitu mewakilkan segala urusan secara mutlak, tanpa dibatasi waktu. Contoh : jualkan sepeda motor ini, tanpa mengatakan harga yang diinginkan.
- 2) *Wakālah al-muqayyadah*, yaitu menunjuk wakil dengan syarat tertentu agar bertindak atas dirinya dalam segala urusan. contoh :

3) *Wakālah al-āmmah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-muṭlaqah*. yaitu akad *wakālah* yang memberikan wewenang secara umum, tanpa ada penjelasan yang rinci. Contoh : belikanlah aku laptop apa saja yang kamu bisa temui.

1) *Wakālah niyābah*, yaitu orang yang mewakilkan tidak diperbolehkan merubah sesuatu hal yang dilakukan. Contoh : Ria memesan kepada Ani bakso. Ani wajib membelikan bakso. apabila bakso yang dipesan Ria tutup/tidak ada, maka Ani tidak diperbolehkan merubah pesanan sebelum mendapatkan ijin dari Ria.

2) *Wakālah Wilāyah*, yaitu orang yang mewakilkan diperbolehkan merubah sesuatu hal yang dilakukan. Contoh : Doni memesan kepada Tio bakso. Apabila ternyata bakso tutup/tidak ada, Tio diperbolehkan merubah pesanan dengan menghubungi Doni.

Perbankan syariah bisa memberi jasa *wakālah*, yakni menjadi seorang wakil dari nasabahnya yang memberikan kuasa (*muwakkil*) untuk melaksanakan suatu hal (*taukil*). Contoh, bank dapat menjadi wakil untuk melaksanakan suatu tagihan pembayaran telepon atau listrik kepada perusahaan telepon atau listrik. Dalam hal ini, bank bisa membebankan biaya administrasi atas jasa *wakālah* tersebut.

- ³² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan...*, 222.

³³ Ibid., 422.

³⁴ Ibid., 247-248.

1. Ketentuan Umum :

- ## 2. Ketentuan Penutup :

- ³⁵ Ibid., 219-220.

**SISTEM PROSENTASE *UJRĀH/FEE* TERHADAP PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN HAJI DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRIAN**

1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Baitul Maal wat Tamwil – Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yang disingkat “BMT UGT Sidogiri”. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh Guru guru yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GTPPS). Di Lembaga Keuangan Syariah tersebut terdapat beberapa orang yang merupakan seorang guru serta pemimpin madrasah alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan serta menyebarnya beberapa simpatisan yang di wilayah Jawa Timur.. Lembaga Keuangan Syariah ini, dimulai pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H / 6 Juni 2000 M. Kemudian

² Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar : CV. Inti Media Komunika, 2018), 16.

Banyak unit pelayanan BMT UGT Sidogiri dibuka di banyak daerah salah satunya yaitu di Krian, Yang beralamat di Desa Krajan Barat, RT.26 RW.06, No.199, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Lembaga Keuangan ini berlokasi di pasar Krian sehingga memang dikhususkan untuk membantu serta melayani pedagang pasar Krian. BMT UGT Sidogiri Capem Krian ini mulai didirikan pada 01 Juni 2010. Latar Belakang mendirikan BMT di daerah pasar Krian yaitu karena banyaknya Rentenir yang beroperasi sehingga banyak pula pedagang pasar Krian yang melakukan pinjaman pada rentenir untuk menambah modal usahanya. Sehingga BMT

a. Visi :

- b. Misi :

- [illegible]



Tugas Kepala Cabang Pembantu yaitu : (1) mengontrol serta memimpin pelaksanaan operasional Cabang Pembantu. (2) memotivasi, membina serta mengontrol disiplin dan kualitas kerja bawahannya. (3) melakukan persetujuan, pemeriksaan, serta pencairan pembiayaan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. (4) menjaga serta mengatur kestabilan sirkulasi keuangan cabang. (5) Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala.

Tugas Kasir yaitu : (1) memberikan pelayanan terhadap penarikan serta penyeteroran tabungan umum. (2) memberikan pelayanan terhadap setoran angsuran pembiayaan. (3) memberikan pelayanan terhadap pencairan tabungan berjangka. (4) Membuat catatan setiap transaksi

pengeluaran/pemasukan suatu keuangan. (5) Menyerahkan serta menyusun laporan keuangan kepada kepala cabang pembantu secara rutin. (6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan.

c. Tugas Account Officer

Tugas Account Officer yaitu : (1) Bertanggungjawab pada pemasaran produk tabungan serta pembiayaan. (2) Bertanggungjawab untuk menjalin relasi yang baik dengan para anggotanya. (3) Mencari anggota yang berpotensi baik. (4) melakukan analisa serta survey pengajuan pembiayaan. (5) memberikan laporan hasil analisa serta survey pengajuan pembiayaan kepada Keadapem. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan. (6) bertanggung jawab serta melaksanakan seluruh tugas yang diberikan. (7) Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada kepala cabang pembantu.

4. Produk Simpanan dan Pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Haji

Tabungan Umum Berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad yang dipraktikkan dalam produk ini yaitu akad *mudharabah musytarakah*, dengan perhitungan perbandingan nisbah 50% untuk BMT dan 50% untuk anggota. Dengan ketentuan melakukan setoran awal minimal Rp.500.000 dan selanjutnya minimal Rp. 100.000. Jika nasabah melakukan penarikan diperbolehkan asalkan

Ketentuan pendaftaran porsi keberangkatan haji : Saldo tabungan Al-Haromain minimal Rp. 25.000.000. Menyerahkan 2 lembar foto copy KTP suami isteri, surat nikah, dan kartu keluarga.

Tabungan Umum Syariah yang setoran dan Penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Akad yang dipraktikkan dalam produk ini yaitu akad *Mudharabah Musytarakah*. Dengan perhitungan perbandingan nisbah yaitu 70% untuk BMT dan 30% untuk anggota. Dengan ketentuan yaitu melakukan setoran awal yakni minimal Rp.10.000 kemudian biaya administrasi pembukaan tabungan yaitu sebesar Rp.5000. Adapun persyaratan awal yang harus dibawa yaitu Foto copy KTP atau SIM.

Tabungan Umrah berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad yang dipraktikkan dalam produk ini yaitu akad *mudharabah musytarakah*, dengan perhitungan perbandingan nisbah yaitu 60% untuk BMT dan 60% untuk anggota. Dengan ketentuan harus melakukan setoran awal minimal Rp.1000.000 dan setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan. Nasabah dapat melakukan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad yang dipraktikkan dalam produk ini yaitu akad *mudharabah musytarakah*, dengan perhitungan perbandingan nisbah yaitu sebesar 60% untuk BMT dan 40% untuk anggota. Dengan ketentuan nasabah diwajibkan melakukan setoran awal sebesar Rp.100.000 setoran berikutnya minimal Rp. 50.000. Nasabah diwajibkan melakukan penarikan hanya pada akhir tahun pelajaran adapun persyaratan awal yang ditetapkan oleh pihak BMT yaitu nasabah diwajibkan membawa foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku, membawa formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga yang bersangkutan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara serta dibubuhi stempel.

5) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

6) Tabungan Kurban

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT yaitu Mengisi sejumlah formulir pembukaan rekening, menunjukkan kartu identitas asli dari wali yang bersangkutan yaitu KTP atau SIM yang masih berlaku. Pihak BMT juga membebankan biaya administrasi dan tabarru' asuransi sebesar Rp.15.000 (untuk kurban kambing) dan Rp.100.000 (untuk kurban sapi), serta biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000.

1) UGT MUB

[illegible]

2) UGT GES

3) UGT MTA

[illegible]

waktu anggaran maksimum satu tahun dan nasabah diharuskan selalu aktif menabung minimal setiap kali angsuran. Maksimal plafon yang diajukan yaitu sebesar Rp.1000.000. Adapun persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pihak BMT yaitu membawa foto copy rekening listrik atau tagihan air selama 3 bulan terakhir.

UGT PBE yaitu produk pembiayaan Pembelian Barang Elektronik yang merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah untuk pembelian suatu barang elektronik. Adapun barang elektronik yang diajukan yaitu barang yang dijual secara legal baik dalam keadaan bekas maupun dalam keadaan baru, bergaransi dari pabrik maupun toko, barang yang diajukan berupa laptop, komputer, TV, audio, kulkas, dan barang –barang lain yang dapat dipasarkan. Akad yang dipraktikkan dalam produk ini adalah akad *murabahah* atau akad *ijarāh muntahiyah bittamlik*.

UGT PKH yaitu produk Pembiayaan *Kafālah* Haji yang merupakan program pembiayaan bagi anggota untuk memperoleh kebutuhan anggaran setoran awal penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag, untuk mendapatkan nomor kursi porsi haji. Akad yang dipraktikkan dalam produk ini yaitu akad *Kafālah bil ujrah* dan *wakālah bil ujrah*. Adapun ketentuan dari pihak BMT yaitu

6) UGT KBB

7) UGT MPB

⁴ Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT ('Ala Madzahib Al-Arba'ah), 11-14.

KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian menawarkan Produk Simpanan dan Pembiayaan. Produk Pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian salah satunya yaitu produk pembiayaan dana talangan haji yang dinamakan UGT Pembiayaan *Kafālah* Haji. Pembiayaan *Kafālah* Haji yang merupakan Program pembiayaan bagi anggota untuk mendapatkan kebutuhan anggaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kemenag, guna memperoleh nomor kursi porsi haji.⁵ Kemenag menentukan biaya setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000. Dalam hal ini pihak BMT memberikan talangan maksimal 90% dari biaya setoran awal BPIH yakni sebesar Rp. 22.500.000 dan biaya 10% ditanggung oleh nasabah sendiri, dengan jangka waktu maksimal selama 5 tahun. *Ujrāh* yang ditetapkan oleh BMT sebesar 1,5% dari talangan yang diberikan yakni Rp. 337.500. Sehingga angsuran perbulannya sebesar Rp. 712.500 (Margin = Rp. 337.500; Pokok = Rp. 375.000), yang kemudian diangsur maksimal selama 5 Tahun.

⁵ Web KSPS BMT UGT Sidogiri, diakses dari <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014.html>, pada tanggal 8 September 2019 pukul 15:39 WIB.

Dengan adanya produk dana talangan haji ini, banyak masyarakat yang terbantu baik dari sisi finansial maupun administrasinya. Adapun manfaat produk pembiayaan dana talangan haji atau *Kafālah* haji (UGT PKH) yaitu :

- ⁶ Dokumen Pembiayaan *Kafalāh* Haji

yang harus dipenuhi yaitu Saldo tab. Bank, Biaya operasional, dan saldo tab. Al-Haromain, sehingga total uang muka yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 7.550.000.

Tabel 3.1 Pembiayaan *Kafālah* Haji Musiman

Nilai Talangan		Rp. 22.500.000
Biaya-biaya	Saldo Tab. Bank	Rp. 100.000
	<i>Ujrāh Kafālah</i> /Tahun	Rp. 4.050.000
	Sharing dana	Rp. 2.500.000
	Operasional	Rp. 400.000
	Saldo Tab. Al-Haromain	Rp. 500.000
Total uang muka		Rp. 7.550.000

Sumber : Brosur Talangan Haji BMT UGT Sidogiri

- Pembiayaan *Kafālah* Haji (PKH) Bulanan

Pembiayaan *Kafālah* Haji Bulanan adalah Pembiayaan *Kafālah* Haji yang *ujrāh* nya dibayar perbulan yakni sebesar Rp. 337.500. Adapun biaya – biaya lainnya yang harus dipenuhi yaitu Saldo tab. Bank, sharing dana, biaya operasional, dan saldo tab. Al-Haromain, sehingga total uang muka yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 3.837.500.

Tabel.3.2 Pembiayaan *Kafālah* Haji Bulanan

Nilai Talangan		Rp. 22.500.000
Biaya-biaya	Saldo Tab. Bank	Rp. 100.000
	<i>Ujrāh Kafālah</i> /bulan	Rp. 337.500
	Sharing dana	Rp. 2.500.000
	Operasional	Rp. 400.000
	Saldo Tab. Al-Haromain	Rp. 500.000

terjadi wanprestasi nasabah, dan nasabah mendapatkan copyannya) sehingga kepastian berangkat haji akan terpenuhi.⁸

4. Penetapan *Ujrah* Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian

KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian menentukan *ujrah* nya sebesar 1,5⁹ % perbulan dengan talangan maksimal Rp. 22.500.000, yang diangsur paling lama selama 5 Tahun. Dalam menentukan *ujrah*, pihak BMT tidak menetapkan *ujrah* dalam bentuk nominal, tetapi dalam bentuk prosentase dan dikarenakan penetapannya dalam bentuk prosentase maka otomatis penetapan *ujrah* didasarkan pada jumlah talangan yang membuat besar *ujrah* berbeda-beda dalam setiap talangan yang diajukan. Jika talangan yang diajukan sebesar Rp. 22.500.000 maka *ujrah* nya 1,5%/bulan yakni sebesar Rp. 337.500. Jika talangan yang diajukan sebesar Rp. 20.000.000 maka *ujrah* nya 1,5%/bulan yakni sebesar Rp. 300.000. Hal ini dibuktikan dengan adanya nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *Kafālah* haji.

Nasabah yang pertama yaitu ibu Iva Churni, yang berprofesi sebagai pedagang. Ibu Iva mengajukan talangan ke pihak BMT sebesar Rp.22.500.000 diangsur selama 5 tahun. *Ujrāh* nya sebesar Rp.337.500/bulan sehingga total *ujrāh* selama 5 tahun sebesar Rp. 20.250.000. Jadi, total hutang

⁸ Ibid.

⁹ Moch. Kusairi (Kepala Capem), *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian, 10 November 2019.

¹² Muhammad, (Kasir), *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian, 10 November 2019.

[illegible]

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 29/DSN-MUI/VI/2002
TERHADAP SISTEM PROSENTASE *UJRĀH/FEE* DALAM
PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM KRIAN**

KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian memiliki salah satu produk yakni pembiayaan dana talangan haji (UGT PKH). Produk pembiayaan dana talangan haji ini adalah pembiayaan untuk nasabah (anggota) agar memperoleh kebutuhan anggaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kemenag, guna memperoleh nomor kursi porsi haji. Pihak BMT menggunakan akad *Kafālah bil ujrāh* dan *wakālah bil ujrāh* untuk program pembiayaan dana talangan haji (UGT PKH) yang diperuntukkan kepada nasabah.

64

[illegible]

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap sistem prosentase *ujrāh/fee* dalam pembiayaan Dana Talangan Haji DI KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian

[illegible]

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis setiap akad yang dipraktikkan pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian dalam pembiayaan dana talangan haji berdasarkan perspektif hukum Islam.

Pelaksanaan akad *Kafālah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, ternyata belum memenuhi ketentuan yang ada dalam hukum Islam yakni belum memenuhi rukun dan syarat *kafālah*. Didalam hukum Islam, akad *kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*Makfūl ‘anhu*).² Agar akad *kafālah* menjadi akad yang sah menurut hukum Islam, maka harus memenuhi Rukun dan syarat-syarat *Kafālah* yang telah diuraikan di bab III. Adapun Rukun *kafālah* yaitu :

1. *Kāfil* (penjamin/penanggung)
2. *Makfūl lahu* (kreditor/yang menghutangi *Makfūl' anhu*)
3. *Makfūl 'anhu* (debitor/yang ditanggung/yang berhutang kepada *Makfūl lahu*)

² Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 43.

Kemudian untuk pelaksanaan akad *wakālah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *wakālah*. Adapun Rukun *wakālah* yaitu :

- Muwakkil* (Nasabah/anggota)
- Wākil* (pihak BMT)
- Muwākkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- Shighat* (Ijāb dan qābul)

Dalam praktiknya, pihak BMT menjadi wakil dari nasabah yang membantu proses pendaftaran haji ke Kemenag setempat dan pihak BMT juga membantu proses pendaftaran dan pembukaan rekening di Bank Panin Syariah sampai nasabah mendapatkan nomor kursi porsi haji, sehingga nasabah mendapatkan

⁴ Muhammad Ghufron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi...*, 116.

- Pengambilan *ujrah* atas akad *Kafālah* juga diperbolehkan menurut Fatwa N MUI. Adapun fatwa yang memperbolehkan pengambilan *ujrah* atas *fālah* yaitu:

- [illegible]

- b. Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2000 : *“Dalam akad Kafālah penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan, Kafālah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.”*⁸

Dalam hal ini Penulis mengambil pendapat dari ulama Wahbah Zuhaili dan al-Mawardi serta Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2000 yang memperbolehkan pengambilan *ujrāh* atas akad *Kafālah* karena untuk melaksanakan amal kebaikan serta memang benar-benar dibutuhkan dikarenakan sekarang ini sulit mencari orang yang rela dan ikhlas menjadi penjamin tanpa diberi imbalan. Namun tetap saja *ujrāh Kafālah* tidak boleh dijadikan lahan untuk memupuk keuntungan, tidak boleh dipersyaratkan dan tidak boleh memberatkan. *Kafālah* dengan *ujrāh* bersifat mengikat sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Seharusnya *ujrāh Kafālah* diberikan atas dasar keikhlasan dan rasa tolong menolong untuk menjaga dan menghormati *esensi* akad *Kafālah* sebagai akad tolong menolong atau akad tabarru'. Adapun firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”⁹

Penetapan *ujrāh* di BMT memakai bentuk prosentase yakni sebesar 1,5% perbulan. Jika ditotal selama 5 tahun *ujrāh* nya sebesar Rp. 20.250.000 dengan

⁸ Ibid., 224.

⁹ Ustaz Teteng Sopian, *Al-Qur'anul Karim; Tafsir Bil Hadis...*, 106.

¹⁰ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta : PT. Qaf Media Kreativa, 2017), 204.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹¹

Melihat kebijakan yang ditetapkan oleh pihak BMT sudah bertolak belakang dengan aturan dalam akad *Kafālah* yang merupakan akad *tabarru'*. Imbalan/*ujrāh* *Kafālah* yang ditetapkan dalam bentuk prosentase yang secara otomatis didasarkan pada besar kecilnya jumlah talangan yang diajukan nasabah sudah jelas digunakan untuk tujuan komersial.

Pihak BMT tidak memiliki dasar hukum dalam menetapkan sistem prosentase *ujrah* tersebut, akan tetapi alasan pihak BMT menetapkan *ujrah* dalam bentuk prosentase dikarenakan dapat memberikan keadilan baik bagi nasabah maupun pihak BMT, karena nasabah yang mengajukan talangan lebih rendah maka *ujrah* yang wajib dibayarnya akan ikut rendah begitu juga sebaliknya. Serta penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase dirasa lebih menguntungkan. Pada hakikatnya BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Besar *ujrah* mengikuti jumlah talangan yang diajukan nasabah, sehingga semakin besar jumlah talangan yang diberikan BMT, maka keuntungan BMT juga semakin besar. Dan penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase dikarenakan memang sudah ditetapkan

¹¹ Ibid., 47.

Selain pengambilan *ujrah* atas *Kafālah*, pihak BMT juga mengambil *ujrah* dari akad *wakālah* yakni pihak BMT menjadi wakil dari nasabah yang membantu proses pendaftaran haji ke Kemenag setempat dan pihak BMT juga membantu proses pendaftaran dan pembukaan rekening di Bank Panin Syariah sampai nasabah mendapatkan nomor kursi porsi haji. Dalam hal ini, pihak BMT

[illegible]

mendapatkan *ujrāh* /imbalan atas jasa telah menjadi wakil dari nasabah (*wakālah*).

Melihat pelaksanaan akad *wakālah* diatas, akad *wakālah* dijadikan akad yang disertai dengan adanya upah/*ujrāh*. Dalam keadaan ini, orang yang memberi mandat (*muwakkil*) mensyaratkan kepada wakilnya yaitu ia tidak diperkenankan membatalkan, kecuali setelah waktu yang sudah ditentukan/dibatasi, jika ia membatalkan maka wajib mengganti upah yang telah dikeluarkan. Sehingga dalam hal ini akad *wakālah* yang disertai dengan upah maka akad itu bersifat mengikat. Dan akad *wakālah* yang didalamnya terdapat upah, maka *wākil* dianggap orang sewaan (upahan) sehingga berlaku hukum sewa-menyewa (*ijārah*).¹³ Dan adapun beberapa ulama yang menyatakan akad *wakālah* diperbolehkan disertai dengan *ujrāh* yaitu :

- a. Menurut Ibn Qudamah :

“Akad taukil (wakālah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”

- b. Menurut penulis Takmilah fath al-qadir dan wahbah zuhaili, menyatakan :

“Wakālah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi saw pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka....Apabila dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijārah”¹⁴

Dan menurut Fatwa DSN MUI tentang *wakālah* juga diperbolehkan yakni :

¹³ Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung : PT.Al-Ma'arif Bandung, 1988), 59.

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan...*, 259.

1. al-Zuhaili menyatakan dalam tafsirnya yaitu sistem bunga yang berlaku pada masa sekarang merupakan bagian dan masuk dalam kategori riba *nasi'ah* yang berlangsung pada masa jahiliyah.
2. Abu Zahrah menyatakan pendapatnya bahwa riba yang dilarang dalam Al-Quran merupakan riba yang dipraktikkan/dijalankan di bank-bank dan masyarakat dan hukumnya haram.
3. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, bunga bank adalah riba yang hukumnya haram.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji di BMT diwajibkan mengembalikan talangan pokok serta memberikan dana tambahan (*ujrāh*) dengan prosentase sebesar 1,5% per bulan yang telah disepakati diawal. Dan apabila dalam jangka waktu yang disepakati belum bisa melunasi maka akan dikenai *ujrāh* lagi. Menurut Abu Ja'far, Allah SWT membolehkan mengambil tambahan/keuntungan dalam jual beli, dan Allah SWT mengharamkan riba yang merupakan tambahan yang disebabkan pelunasan utang yang ditunda setelah jatuh tempo. Meskipun keduanya (jual beli dan utang) menghendaki adanya tambahan, Allah SWT menghalalkan bentuk tambahan pada jual beli dan tidak pada utang piutang.

[illegible]

tidak berbeda jauh dengan apa yang disebut bunga yang mengarah kepada riba, yang memberikan tambahan dari pinjaman pokok tanpa adanya padanan yang setara. Hal ini didukung dengan adanya fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “*Ujrah* dalam bentuk prosentase dan diperhitungkan dari pokok pinjaman dan berdasarkan tempo waktu dinamakan bunga”. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran (3) : 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مَّذْخَرَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁷

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang. Islam mengharamkan riba (*usury*/bunga) sehingga, dalam sistem ekonomi yang berprinsip pada Al-Quran dan Sunnah tidak diizinkan menggunakan bunga untuk mencari harta kekayaan dan nafkah.¹⁸ Apalagi berangkat haji dengan uang yang mengandung riba sangat dilarang dalam Islam.

Pihak BMT menetapkan *Ujrāh* dalam bentuk prosentase, yang sudah jelas ditetapkan dengan menyatukan prosentase *ujrāh* dengan jumlah talangan yang diajukan nasabah serta otomatis didasarkan pada besar kecilnya jumlah talangan yang diajukan nasabah. Hal ini akan bertolak belakang dengan aturan Dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang telah diuraikan di bab III tentang Pembiayaan pengelolaan haji, yang menjelaskan bahwa besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

¹⁷ Ustaz Teteng Sopian, *Al-Qur'anul Karim; Tafsir Bil Hadis...*, 66.

¹⁸ M.Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip..., 51.*

merupakan salah satu rukun Islam akan terbebas dari unsur riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem prosentase *ujrah* terhadap pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian menjadi dasar pembebanan kewajiban *ujrah* yang berasal dari akad *kafalah* bil *ujrah* dan *wakalah* bil *ujrah* kemudian *ujrah* dijadikan satu dan ditentukan dalam bentuk prosentase tertentu yakni 1,5% perbulan dari jumlah talangan yang diajukan nasabah. Cara pembayaran *ujrah* diangsur perbulan bersama dengan angsuran pokok.
2. Menurut analisis hukum Islam, sistem prosentase *ujrah* terhadap pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian belum memenuhi rukun serta syarat-syarat akad *Kafalah* sebab tidak ada utang piutang sebelumnya antara *Makful* 'anhu (nasabah) dan *Makful lahu* (Kemenag). Sehingga tidak ada objek *Kafalah* berupa hutang yang akan dijamin/ditanggung oleh *Kafil* (BMT) dan belum dapat disebut sebagai utang piutang yang mengikat serta lazim yang tertuang dalam syarat-syarat objek *Kafalah*. Menurut hukum Islam bahwa penetapan sistem prosentase *ujrah* yang dipraktikkan di BMT belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang menyatakan besar imbalan tidak boleh didasarkan pada besar kecilnya jumlah talangan. Namun, pihak BMT mempunyai alasan sendiri menetapkan *ujrah* dalam bentuk prosentase karena dapat memberikan keadilan baik bagi nasabah maupun

2. Menurut analisis hukum Islam, sistem prosentase *ujrāh* terhadap pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian belum memenuhi rukun serta syarat-syarat akad *Kafālah* sebab tidak ada utang piutang sebelumnya antara *Makfūl ‘anhu* (nasabah) dan *Makfūl lahu* (Kemenag). Sehingga tidak ada objek *Kafālah* berupa hutang yang akan dijamin/ditanggung oleh *Kāfil* (BMT) dan belum dapat disebut sebagai utang piutang yang mengikat serta lazim yang tertuang dalam syarat-syarat objek *Kafālah*. Menurut hukum Islam bahwa penetapan sistem prosentase *ujrāh* yang dipraktikkan di BMT belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengelolaan haji yang menyatakan besar imbalan tidak boleh didasarkan pada besar kecilnya jumlah talangan. Namun, pihak BMT mempunyai alasan sendiri menetapkan *ujrāh* dalam bentuk prosentase karena dapat memberikan keadilan baik bagi nasabah maupun

1. Kepada Dewan Syariah Nasional MUI agar membuat Fatwa tentang *Kafālah bil ujrah* dan *wakālah bil ujrah* secara terperinci lagi, terutama dalam hal penetapan *ujrah*. Sehingga praktik dana talangan haji yang ada di Lembaga Keuangan Syariah berjalan dengan baik, dan permasalahan juga dapat diselesaikan sesuai dengan aturan syariat.
2. KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian agar mempertimbangkan ulang mengenai penggunaan akad *Kafālah bil ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji agar sesuai dengan aturan hukum Islam. Serta mempertimbangkan pengambilan *ujrah* dalam bentuk sistem prosentase agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 agar keberangkatan haji tidak mengarah dan tidak terjebak dengan praktik riba.
3. Kepada Pemerintah untuk lebih menertibkan praktik pembiayaan dana talangan haji yang ada di seluruh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ja'far Sodik. *Tuntunan Haji & Umrah*. Yogyakarta: Buku Pintar, 2013.
- Ajija, Shochrul Rohmatul dkk. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV. Inti Media Komunika, 2018.
- Akbar, Abdul Wahid al-Faizin Nash. *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Quran)*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Alimah (Nasabah Pembiayaan Kafalāh Haji). *Wawancara*. Sidoarjo: 30 Oktober 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aprilleo, Aldy. *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan Ijārah Pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syirkah Mu'awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur*. Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT ('Ala Madzahib Al-Arba'ah).
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Iva Churni (Nasabah Pembiayaan Kafalāh Haji). *Wawancara*. Sidoarjo: 30 Oktober 2019.
- Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Dokumen Pembiayaan Kafalāh Haji.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. *Model Pengambilan Keputusan Garbage Can dan Dana Talangan Haji*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

- Firdausi, Febry Amalia. *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 Terhadap Praktik Akad Kafālah Bil Ujrāh Pada Pembiayaan Konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru*. Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ghufron, Muhammad. *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014
- Hajr, Imam Ibn. *Bulūgh Al-Marām Min Ādilāt Al-Āhkām*. Beyrouth Liban: Dar El Fiker, 1993.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kusairi, Moch (Kepala Capem). *Wawancara*. KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian. Sidoarjo: 10 November 2019.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2015.
- _____. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : KENCANA Prenadamedia Group. 2015.
- Muhammad (Kasir). *Wawancara*. KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian. Sidoarjo: 10 November 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadrattuzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam Di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian : Memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh Sunnah 5*. Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987.
- _____. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung, 1988.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Sopian, Ustaz Teteng. *Al-Qur'anul Karim; Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba Internasional, 2018.
- Suprio, Guntoro. *Spriti HAJI Inspirasi Menjawab Fenomena Global*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Umam, Khotibul dkk. *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Vironika, Ari. *Studi Komparasi Terhadap Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT. Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo*. Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2017.
- Zuhdy, Halimi. *Sejarah Haji & Manasik*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-pengurusan-haji-lembaga-keuangan-syariah> diakses pada Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 11:08 WIB.
- Web KJKS BMT UGT Sidogiri, diakses dari <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014.html>, pada tanggal 8 September 2019 pukul 15:39 WIB.